

ANALISIS PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SIKDA) BERBASIS AKRUAL TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

(Studi di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo)

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan di Indonesia dari kas basis menuju akrual basis yang mengakomodir transaksi ekonomi untuk diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, maka dibutuhkan sebuah sistem yang handal guna mewujudkan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, pengamatan/ observasi, dokumentasi serta *triangulasi*. Landasan teori yang digunakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual pada UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah dilaksanakan tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, karena masih ada beberapa tahapan dari siklus akuntansi yang masih harus dibenarkan. Dalam pencatatan laporan keuangannya masih menggunakan basis kas untuk mencatat transaksi yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas dan pengeluaran kas dicatat di Buku Kas Umum (BKU). Sehingga perlu disempurnakan agar penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dapat dilaksanakan dan dievaluasi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Kata kunci : *Standar Akuntansi Pemerintahan, SIA Pengelolaan Keuangan, Berbasis Akrual, Kas basis, Akrual Basis, Penyajian Laporan Keuangan, Siklus Akuntansi, Buku Kas Umum*

Pendahuluan

Upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel, transparansi, efektif dan efisien dan pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu, akurat dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan (Pasal 1 ayat (11) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP). Kualitas sistem informasi dalam laporan keuangan pemerintah tersebut sangat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap standar akuntansi dan didukung oleh sebuah sistem yang handal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, mengubah haluan basis akuntansi pemerintahan Indonesia dari kas menuju akrual menjadi Akuntansi berbasis akrual mengakomodir transaksi ekonomi dan peristiwa yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Manfaat penggunaan metode berbasis akrual ini diharapkan akuntansi pemerintahan mampu memperbaiki kinerja pemerintahan secara keseluruhan, baik dalam hal penyusunan anggaran

maupun realisasi anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis laporan keuangan yaitu: laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dikelompokkan dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan kelompok laporan finansial yang sudah menggunakan basis akrual.

Perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual yang berdampak langsung ke perubahan metode dan alur aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini SIKDA, menjadi tantangan serta target utama pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian aplikasi dari metode basis kas menjadi aplikasi dengan metode basis akrual, hal ini juga dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai konsekuensi pelaksanaan perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual.

Masalah utama yang ada di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo terkait dengan penerapan SIKDA berbasis akrual yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga penginputan ke dalam Aplikasi SIKDA berbasis akrual sering terjadi kesalahan karena kurang pemahannya aplikator antara lain kesalahan pemilihan kode rekening belanja, terjadi input data dobel, pencatatan tanggal kejadian transaksi dan waktu bayar transaksi, tanggal pengakuan beban pada belanja listrik, telepon air dan lain-lain. Penyusunan Laporan Keuangan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo dapat dilihat dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran, dan juga diambil dari Buku Kas Umum (BKU) yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Semua transaksi kemudian dikelompokkan berdasarkan kegiatannya kedalam perincian penerimaan dan pengeluaran, semua biaya pengeluaran dicatat ke dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ).

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku kuasa pengguna anggaran harus

menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja, yang berada dalam tanggung jawabnya. Hal ini berarti bahwa setiap SKPD harus membuat laporan keuangan unit kerja. Sedangkan laporan keuangan yang harus dibuat setiap unit kerja adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, Untuk itu, pemerintah daerah maupun SKPD yang mereka miliki dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan dan menyampaikan informasi keuangan tersebut secara transparan kepada publik.

Sujarweni (2015:18) menjelaskan akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai pelaksanaan dan pelaporan termasuk pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi pemerintah termasuk juga lembaga-lembaga non profit mengkhususkan pada masalah dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pengertian Sistem Akuntansi

Menurut *W. Gerald Cole* dalam Baridwan menjelaskan sistem adalah suatu kerangka dari prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012:36).

Sistem Akuntansi dapat di definisikan sebagai kumpulan dari sub sistem sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mengolah data keuangan menjadi informasi keuangan yang diperlukan oleh

pengambil keputusan dalam proses pengambilan keputusan di bidang keuangan.

Pengertian Aplikasi SIKDA

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKDA) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIKDA memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban.

Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah

Tujuan akuntansi keuangan baik untuk perusahaan maupun pemerintahan itu sama, hanya akuntansi untuk pemerintahan dikelompokkan sebagai akuntansi yang berdiri sendiri terpisah dari akuntansi perusahaan. Menurut PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan yaitu Tujuan Laporan Keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Menurut Mardiasmo dalam Glynn (2002:14), menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi
2. Memberikan informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik.

Sistem Pencatatan Dan Dasar Pengakuan

Sistem Pencatatan pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Pengukuran transaksi ekonomi yaitu dengan menggunakan satuan uang, oleh karena itu semua transaksi akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Pencatatan transaksi ekonomi yaitu pengelolaan data transaksi ekonomi tersebut

melalui penambahan atau pengurangan oleh sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi. Ada beberapa macam pencatatan yang dapat digunakan, yaitu:

1. Single Entry
Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.
2. Double Entry
Sistem pencatatan double entry juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Sistem pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.
3. Triple Entry
Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara pencatatan double entry dijalankan, Satuan Pemegang Kas pada Satuan Kerja maupun pada Bagian Keuangan Pemerintah Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

Setelah memahami sistem pencatatan, masih terdapat satu hal lagi yang penting dalam proses pencatatan, yaitu masalah pengakuan. Pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai sistem/basis/dasar akuntansi, antara lain:

1. Basis kas (Cash Basis) merupakan basis akuntansi yang paling sederhana. Menurut basis ini, transaksi diakui/dicatat apabila menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, yaitu menaikkan atau menurunkan kas. Apabila suatu transaksi ekonomi tidak berpengaruh pada kas, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat.
2. Basis Akrua (Accrual Basis) adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat

kas dan setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis Kas Modifikasian (Modified Cash Basis) ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.
4. Basis Akrual Modifikasian (Modified Accrual Basis) ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi pertimbangan kepraktisan

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima pada masa yang akan datang, karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Pada sektor publik, keputusan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi saja, tetapi banyak keputusan politik dan sosial seperti pengangkatan atau pemberhentian menteri dan pejabat pemerintah, serta pemberian bantuan program kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu sangat tergantung kepada pertimbangan ekonomi pemerintah.

SAP berbasis kas menuju akrual adalah Standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, kewajiban dan ekuitas dana berbasis akrual. SAP berbasis kas menuju akrual diterapkan dalam masa transisi bagi entitas yang belum siap menerapkan SAP berbasis akrual pada tahun 2015. Laporan keuangan yang dihasilkan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dibagi dalam dua entitas yaitu entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas akuntansi yaitu entitas yang menyajikan laporan keuangan satuan kerja untuk disampaikan ke entitas pelaporan menyusun neraca, laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan entitas pelaporan yaitu entitas

yang menyusun laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah secara konsolidasi maka ditambahkan laporan arus kas dari ketiga laporan keuangan tersebut.

Dalam hal berkaitan dengan penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP No 71 Tahun 2010 maka setiap pemerintah daerah provinsi/ kabupaten dan kota dianggap perlu menyusun kebijakan akuntansi tersebut. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah

Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Akuntansi berbasis akrual sangat penting dalam akuntansi karena menentukan asumsi yang akan dipakai dalam melakukan pencatatan dan pelaporan. Basis akuntansi yang dipilih akan menentukan jenis pelaporan, terutama bentuk laporan, karena akan mempengaruhi informasi maupun unsur yang akan dilaporkan. Basis akuntansi yang dipilih juga akan mempengaruhi susunan standar akuntansi yang dibangun, baik kerangka konseptual maupun pernyataan yang terkait dengan kapan sebuah transaksi diakui dan seberapa besar nilainya.

Secara sederhana, penerapan akuntansi berbasis akrual ditujukan mengatasi ketidakcukupan basis kas untuk memberikan data yang lebih akurat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di dalam pemerintah dengan menggunakan informasi yang diperluas, tidak sekedar basis kas. Tujuan kuncinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban para pengelola dari sisi keluaran dan hasil serta pada saat yang sama mengendalikan atas masukan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sekurang-kurangnya meliputi: prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur pengeluaran kas, prosedur akuntansi asset tetap/barang milik daerah, dan prosedur akuntansi selain kas.

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD meliputi serangkaian prosedur baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD.
3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klarifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai SKPD. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah : metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.
4. Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai dari pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan kejadian keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan selain kas pada SKPD

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2016 : 07), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-anggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lebih lanjut Saryono (2010) mengemukakan bahwa Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengambilan sampel atau sumber data pada penelitian ini dilakukan secara purposive dan untuk ukuran sampel tersebut ditentukan secara snowball, taknik

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisa data bersifat kualitatif dan hasil penelitian menekankan makna generalisasi. Hasil dari penelitian ini hanya mendeskripsikan atau mengkonstruksikan wawancara-wawancara mendalam terhadap subjek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penyajian laporan keuangan.

Populasi dan Sampel

Sugiyono (2004:72) menyatakan bahwa Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. Dalam penentuan Lokasi penelitian, Moleong (2007:132) menentukan cara terbaik untuk ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan dan mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan. Sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive), yang dilakukan pada salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita yang bertempat di Jl. Monginsidi No. 25 Sidoarjo.

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah pegawai ASN dengan Jabatan Bendahara dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua, seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang. Sugiyono (2007:208) tidak menggunakan istilah populasi pada penelitian kualitatif, melainkan Social Situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu, tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity). Situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang ingin diketahui apa yang terjadi didalamnya.

Definisi Operasional Variabel

Sehubungan dengan judul penulisan yang dijadikan bahan penelitian oleh penulis, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah berbasis akrual serta Penyajian Laporan Keuangannya.

1. Sistem Akuntansi keuangan daerah adalah suatu susunan yang teratur dari suatu asas atau teori untuk proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah, pemda (kabupaten, kota atau provinsi) yang disajikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), badan pengawasan keuangan, investor, kreditur dan donator, analis ekonomi dan pemerhati pemda yang seharusnya ada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah
2. Laporan Keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Selain itu, tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2013 : 3), tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kedepannya

Sumber dan Pengumpulan Data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:165), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Sedangkan untuk mendapatkan data dan informasi maka informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive atau sengaja dimana informan telah ditetapkan sebelumnya. Informan merupakan orang-orang yang terlibat atau mengalami proses pelaksanaan dan perumusan program dilokasi penelitian.

Sumber dan Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. menurut Sugiyono (2013:224) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Data yang dikumpulkan dari penelitian ini berasal dari dua sumber, yaitu:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan baik melalui observasi maupun melalui wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer dilakukan dengan cara wawancara langsung terhadap ASN dengan Jabatan Bendahara maupun Operator SIKDA
2. Data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau literatur-literatur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), internet, surat kabar, jurnal dan lain sebagainya. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengambil atau menggunakannya sebagian/ seluruhnya dari sekumpulan data yang telah dicatat atau dilaporkan

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui empat metode, yaitu :

1. Wawancara
Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti termasuk kedalam jenis wawancara terstruktur.

2. Pengamatan/ Observasi
Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2013:240) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel kalau didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian yang dapat dijadikan bahan triangulasi untuk mengecek data dan merupakan bahan utama dalam penelitian
4. Triangulasi, dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan datayang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada

Pengumpulan data menurut Sugiyono (2015 : 224) dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bermacam-macam teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan

dokumentasi. Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan, Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Proses memasuki lokasi penelitian Sebelum memasuki lokasi penelitian untuk memperoleh data, pada tahap ini terlebih dahulu peneliti meminta surat izin dari STIE MAHARDHIKA SURABAYA bahwa akan melakukan penelitian pada salah satu Unit Pelaksana Teknis SKPD Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ditujukan kepada Kepala Dinas bahwa akan melakukan penelitian di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo. Setelah itu, peneliti mengutarakan maksud dan tujuan penelitian untuk menciptakan kepercayaan kepada masing-masing pihak, kemudian menentukan waktu melakukan wawancara.
2. Ketika berada dilokasi penelitian (getting along) Dalam hal ini peneliti berusaha melakukan hubungan secara pribadi dan akrab dengan subjek penelitian, mencari informasi dan berbagai sumber data yang lengkap serta berusaha menangkap makna dari berbagai informasi yang diterima serta fenomena yang diamati. Oleh karena itu, peneliti berusaha sebijak mungkin sehingga tidak menyinggung informan secara formal maupun informal. Pengumpulan data (logging data) Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditetapkan berdasarkan fokus penelitian

Analisa Hasil

Dalam penelitian kualitatif dikemukakan disini menurut Sugiyono (2015 : 244) bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kompreatif yaitu metode analisis yang dilakukan dengan membandingkan teori – teori dengan praktik yang terjadi dalam perusahaan, kemudian mengambil

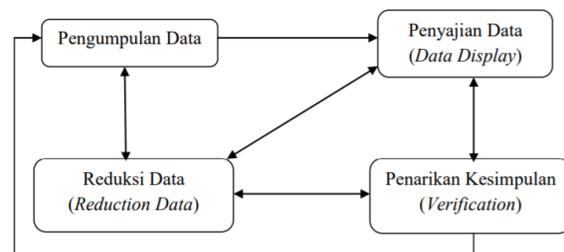
kesimpulan dari hasil perbandingan tersebut. Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif yang dilakukan untuk mengidentifikasi pemahaman penerapan SAP Berbasis Akruar.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Apabila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga datanya sudah tidak jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain :

1. Reduksi Data (Reduction Data) Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya akan cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dituangkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Laporan lapangan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal penting kemudian dicari tema atau polanya.

2. Penyajian Data (Data Display) Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakanya suatu kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan (Concluting Drawing) Penarikan Kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

Berikut adalah gambar dari analisis data dan model interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2007:189)



Gambar 3.1 Analisis Model Interaktif

Analisis Model Interaktif Gambar mengenai komponen analisis data model Miles dan Huberman diatas menjelaskan bahwa, dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. proses yang bersamaan tersebut meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Pembahasan

Dari analisis yang diungkapkan di atas dapat diambil garis besarnya bahwa UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah melakukan persiapan-persiapan dan strategi yang matang sehingga tercipta keberhasilan dalam mengimplementasi Basis Akruar dengan

baik, terbukti dengan diperolehnya Opini Dari BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah menerapkan SAP Basis Akrua. Jadi, dapat dikatakan bahwa peraturan pemerintah apa yang berlaku saat ini maka peraturan tersebut yang akan diikuti oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Hal ini merupakan contoh yang baik yang dapat dilihat dari sektor publik, bahwa setiap ada perubahan peraturan maka pemerintah daerah yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat wajib melaksanakan peraturan baru tersebut karena adanya nilai kepatuhan terhadap hukum. Nilai kepatuhan terhadap hukum tersebut mendorong tindakan pemerintah untuk senantiasa mengikuti aturan standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang berlaku saat ini yaitu SAP berbasis akrua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah. Hal ini didukung dengan perubahan sistem akuntansi pemerintah yang digunakan dari Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) menjadi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua (SIBAKU) pada tahun 2015. SIBAKU merupakan sistem informasi manajemen perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi antara perencanaan, penyerapan realisasi belanja dan penyesuaian akun-akun yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan. Pembekalan pelatihan dipersiapkan untuk Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai SKPD yang bertugas, sehingga dengan mudah menyesuaikan perubahan sistem akuntansi yang ada. Adanya pencatatan beban pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua diakui oleh beban tetapi penginputan itu tidak muncul pada laporan operasionalnya.

Belanja barang yang bernilai lebih dari Rp. 25.000.000,00 dilakukan pembayaran secara langsung (LS) dan juga untuk semua belanja modal sehingga tidak di input pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua. Pemisahan tugas dan fungsi dilakukan untuk petugas SIMBADA (Sistem Informasi Barang Milik Daerah) dan petugas akuntansi pelaporan yang mana terintegrasi secara langsung dalam SIMBADA sehingga tidak perlu dilakukan penginputan ganda. Perubahan jenis laporan

keuangan yang dihasilkan oleh UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo sebagai entitas akuntansi dengan menerapkan basis akrua yaitu penambahan penyusunan laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas dari yang sebelumnya laporan realisasi anggaran, neraca, dan CALK. Secara rinci analisis perbandingannya sebagai berikut.

1. Neraca Secara keseluruhan akun-akun dan pos dalam aset, kewajiban dan ekuitas telah dijelaskan dalam CALK sesuai SAP 71. Adanya salah pengungkapan akun yang seharusnya software masuk ke dalam aset tak berwujud tetapi dijelaskan masuk dalam pos aset tetap lainnya.
2. Laporan operasional yang mengakui adanya pendapatan LO dan beban. Pengukuran pendapatan diakui berdasarkan asas bruto yaitu suatu prinsip yang tidak memperkenankan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu entitas organisasi. Pendapatan LO disajikan dalam laporan operasional sesuai klasifikasi BAS dan diungkapkan dalam CALK. Pencatatan beban diakui saat timbul kewajiban untuk membayar, terjadiya konsumsi aset dan adanya penurunan manfaat ekonomis dari suatu barang atau jasa. Beban akumulasi penyusutan dalam metode penyusutan aset tetap yang menggunakan garis lurus. Pencatatan beban disajikan dalam laporan operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Perbandingan antara pendapatan LO dan beban menghasilkan surplus/ defisit. Dalam catatan atas laporan keuangan (CALK) belum dijelaskan secara rinci dan informatif.
3. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan saldo akhir ekuitas setelah ekuitas awal ditambahkan/ dikurangi surplus/ defisit dalam laporan operasional dan koreksi-koreksi pencatatan belum dijelaskan secara rinci dan informatif dalam catatan atas laporan keuangan (CALK).

Dampak yang terjadi atas penerapan basis akrua dalam penyusunan laporan keuangan meliputi :

1. Penyajian ekuitas akhir diperoleh dari laporan perubahan ekuitas sehingga dapat ditelusur perolehannya.
2. Perhitungan penyusutan dan amortisasi dapat dilakukan pada setiap pembelian untuk aset tetap dan aset tak berwujud dengan melihat

- harga perolehan dan masa manfaat sesuai kebijakan akuntansi yang berlaku.
3. Dengan adanya perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah yaitu Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI maka penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah, terkoordinasi dan lebih terintegrasi mulai dari penginputan, pencatatan dan pelaporan.
 4. Dengan adanya penerapan basis akruaI yang didukung perubahan sistem akuntansi yang digunakan maka dapat memotivasi sumber daya manusia SKPD yang ada untuk update dan lebih terpacu dalam belajar informasi teknologi (IT).
 5. Sistem akuntansi pemerintah yang ada yaitu Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI (SIBAKU) dapat digunakan oleh manajemen SKPD sampai dengan Unit Kerja setempat untuk memantau serapan anggaran tiap periode, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan-kebijakan baru untuk periode selanjutnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sistem pencatatan transaksi pada UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo telah dilaksanakan, tetapi belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah karena masih ada beberapa tahapan-tahapan dari siklus akuntansi yang masih harus dibenarkan. Selanjutnya di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo masih menggunakan basis kas yaitu bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila transaksi belum mengakibatkan perubahan pada kas berarti transaksi tersebut belum dicatat pada Buku Kas Umum (BKU) sehingga rawan terjadi kelalaian dalam pembukuan aktifitas belanja. Penerapan pada Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI sudah menggunakan basis akruaI terbukti dengan adanya item beban

pada aplikasi tersebut sehingga dapat mengakui terjadinya transaksi yang belum dibayarkan.

2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaI yaitu terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, masih belum adanya SDM lulusan Sarjana Ekonomi atau yang berhubungan dengan Teknologi Informatika sehingga kurang pemahannya aplikator tentang penginputan ke dalam Aplikasi SIKDA berbasis akruaI sering terjadi kesalahan antara lain kesalahan pemilihan kode rekening belanja, terjadi input data dobel, pencatatan tanggal kejadian transaksi dan waktu bayar transaksi, tanggal pengakuan beban pada belanja listrik, telepon air dan lain-lain. Selanjutnya untuk pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dijabat oleh PNS selaku Operator Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Jabatan Pengadministrasi Keuangan belum sesuai atau tidak dijalankan, karena jabatan tersebut masih dirangkap/dikerjakan oleh PTT-PK yang lebih memahami tentang Aplikasi SIBAKU.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi pemegang kas sebaiknya setiap terjadi transaksi langsung mencatatnya kedalam BKU, Jurnal, dan Buku Besar, supaya informasi yang dihasilkan dari pembukuan tersebut menggambarkan keadaan sesungguhnya, serta melakukan pemisahan jurnal antara transaksi penerimaan kas dengan transaksi pengeluaran kas sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.
2. Perlu adanya Diklat atau Pelatihan Khusus mengenai cara penggunaan Aplikasi SIKDA berbasis AkruaI di UPT. Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Balita Sidoarjo, Jika perlu adanya pengembangan potensi untuk menempuh pendidikan lanjut dengan jurusan yang sesuai dengan jabatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Baridwan, Zaki, 1991, *Sistem Akuntansi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta,
- Bastian, Indra, 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta
- _____ 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi II. PT Indeks, Jakarta.
- Ghazali, Imam dan Sabeni, Arifin , 1998, *Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan*, Edisi 2, Yogyakarta
- Halim, Abdul dan Muhammad S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2004, *Standar Akuntansi Keuangan, Tentang Penyajian Laporan Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Kusnadi, 2002, *Akuntansi Pemerintahan (Publik)*, Universitas Brawijaya, Malang
- Langelo, Friska. 2015. *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung*. JURNAL EMBA Vol. 3 No 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/embamba/article/view/6556> Diakses tanggal 22 November 2019 Hal. 1-8
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Cetakan Pertama. UII Press, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- _____ 2006, *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik : Suatu Sarana Good Governance*, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Volume 2 No.1, hal: 1-17.
- Masmudi, 2003, *Laporan Keuangan Sektor Publik*, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, BPK, Yogyakarta
- Moleong, Lexy J. 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, 2001, *Sistem Akuntansi*, Edisi Empat, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta
- Narko, 2002, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2010, *Undang-undang Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2007, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Smith dan Skousen, 2009, *Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Saryono, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- _____ 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Alfabeta, Bandung
- Sujarweni, V Wiratna. 2015, *Sistem Akuntansi*, *Pustaka Baru Press*, Yogyakarta.

